

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN 2020**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA**

**PALANGKA RAYA
2020**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, kami telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2020.

Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun 2020, harus dilakukan Evaluasi Tingkat Capaian Keberhasilannya.

Capaian Keberhasilan / Kinerja yang terakreditasi melalui penilaian dengan standar yang telah ditetapkan sebagai pembandingan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.

Laporan Kinerja (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya disesuaikan sebagai suatu upaya dalam pemenuhan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai penjabaran Visi dan Misi Instansi Pemerintah dalam kerangka perwujudan Good Governance.

Menyadari akan kekurangan dan keterbatasan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih memerlukan penyempurnaan sehingga kritik, saran dan pemikiran yang sifatnya membangun sangatlah diperlukan dimasa-masa datang.

Sebagai ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama segenap rekan-rekan pejabat/staf pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya atas bantuan dan kerja kerasnya dalam pelaksanaan Tugas selama Tahun 2020 ini.

Palangka Raya, Februari 2020
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA

Ir. JANUMINRO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620713 198903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.4 Aspek Strategis Organisasi	4
1.5 Permasalahan Umum	5
1.6 Sistematika Penyajian	6
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Tujuan/ Sasaran Strategis	8
2.3 Kebijakan dan Program	9
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	10
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020	11
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	11
3.2 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019	11
3.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020....	12
3.2.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019	13
3.2.3. Perbandingan Anatar Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah	13
3.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2020	14
3.2.5. Analisis atas Efisien Penggunaan Sumber Daya.....	14
3.2.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	15
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2020	16
BAB. IV PENUTUP	18
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis	18
Lampiran	20
Capaian realisasi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020	
Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	
Fakta Kota Integritas dan Perjanjian Kinerja	
Indicator Kinerja Individu	
Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
Notulen Rapat.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Kota Palangka Raya mengacu dari Visi dan Misi serta Rencana Strategis sehingga berbagai kegiatan yang dilaksanakan akan menjadi lebih terarah dan terukur.

Aspek Strategis yang ingin dicapai dalam bidang Pembangunan Politik adalah berupa Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palangka Raya dengan capaian kondisi Sosial Politik dan Kemasyarakatan, berkaitan dengan kondisi Sosial Ekonomi, Kultural, sehingga berbagai Gejolak Sosial semakin berkurang dan Sinergisme Komunikasi Sosial serta Komunikasi Politik dalam rangka menunjang Pembangunan menjadi semakin ditingkatkan. Hal tersebut sesuai dengan penjabaran Program Departemen Dalam Negeri cq. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dari hasil Pengukuran Capaian Kinerja yang telah dilakukan, secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya dapat dikategorikan cukup baik, namun harus dilakoni bahwa masih banyak sasaran yang belum tersentuh capaian target yang diinginkan dalam tahun 2020 dan sebagai langkah perencanaan strategis tahun berikutnya.

Demikian pula Capaian Keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik yang bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 secara umum telah berhasil dilaksanakan dengan Kategori Capaian Cukup Baik karena dalam pelaksanaannya dapat memenuhi target kegiatan seperti yang direncanakan.

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja disusun sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intstansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akunrabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada suatu Perencanaan Strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governmance). Dalam Good Governmance dituntut adanya sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legistimatif sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sejalan dengan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palangka Raya yang memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya telah merencanakan dan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran telah dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023 dan Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023. Selanjutnya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 ini.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2020 adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan kinerja Tahun 2020.
2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

Tujuan penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2020 adalah :

1. Mewujudkan pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.
3. Terlaksananya program dan kegiatan secara efisien, efektif, dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

1.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

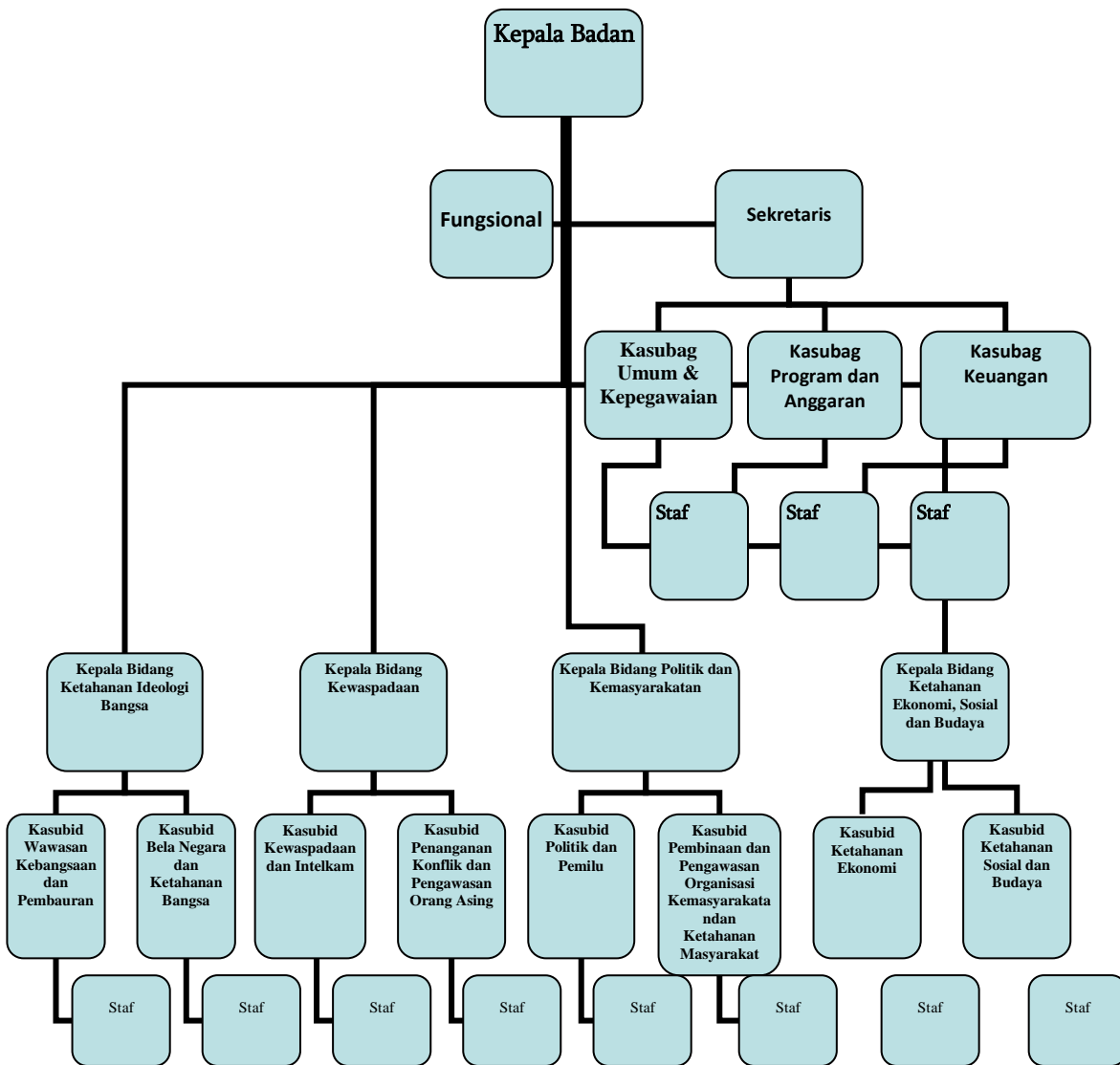
Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

terkait sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Kota Palangka Raya yaitu pembinaan teknis dan pengkoordinasian serta mediasi/fasilitasi, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur teknis serta pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan, pembauran, kewaspadaan nasional, fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Untuk mengaktualitas tugas pokok dan fungsinya tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai struktur organisasi seperti di tunjuk pada gambar 1.1 pada halaman berikut .



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palangka Raya

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai Tugas Pokok merumuskan kebijakan operasional badan, mengendalikan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dibidang kesatuan bangsa, integrasi bangsa dan perlindungan masyarakat secara terpadu bersama-sama dengan instansi terkait sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping pengaruh-pengaruh positif, kondisi ini juga membawa pengaruh negatif yang berdampak pada peningkatan potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan terhadap ideologi dan semangat kebangsaan serta dalam menciptakan kondusifitas daerah dan tingginya intensitas gangguan kamtibmas. Potensi tersebut antara lain dalam bentuk degradasi semangat kebangsaan dan bela negara, peningkatan konflik sosial, dan maraknya paham sarat kelompok radikal.

Kondisi-kondisi ini dapat berpotensi mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan serta cinta tanah air, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait dan melalui peran serta semua elemen masyarakat. Dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia juga cukup pesat yang ditunjukkan antara lain dengan diterapkannya sistem multi partai dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Perkembangan ini menuntut kecerdasan politik masyarakat dan kesiapan Partai Politik sebagai salah satu unsur utama dalam infrastruktur politik. Namun aktualitas Partai Politik sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat belum sepenuhnya berlangsung dengan optimal karena sebagai kondisi internal Partai Politik maupun perkembangan kondisi eksternal.

Kaderisasi Partai Politik yang belum berjalan dengan baik serta kecenderungan Partai Politik yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok elite-elitanya dibandingkan dengan kepentingan masyarakat, menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap Partai Politik. Dalam konteks tersebut, diperlukan upaya dan dukungan dengan mendorong dan memfasilitasi Partai Politik untuk terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitas dan pemberian dukungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5 Permasalahan Utama (*Strategic issued*)

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

- (1) Mutasi atau promosi pada staf dan pejabat tidak sesuai dengan keadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sehingga masih ada pegawai yang rangkap tupoksi.
- (2) Anggaran yang diterima Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, khususnya menyangkut belanja langsung seperti kegiatan Pelaksanaan Pemilu yang kurang memadai dalam pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pemilu.
- (3) Masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dalam politik ;
- (4) Masih kurangnya komunikasi antar Organisasi Politik, Ormas dan Pemuda.
- (5) Menurunnya nilai - nilai luhur budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (6) Fasilitasi pendirian tempat ibadah masih diperlukan karena masyarakat banyak yang kurang paham.
- (7) Pengawasan terhadap orang asing masih lemah.
- (8) Reformasi tentang deteksi dini masih kurang sarana dan prasarana.
- (9) Kesadaran masyarakat masih kurang terutama menyangkut keamanan dan ketertiban.
- (10) Kurangnya informasi yang cepat dan akurat tentang kondisi ekonomi masyarakat.

1.6 Sistematika Penyajian.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.4 Aspek Strategi Organisasi
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA.

- 2.1 Rencana Strategis 2018 - 2023
- 2.2 Tujuan/ Sasaran Strategis
- 2.3 Kebijakan dan Program
- 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020
- C. Realisasi Anggaran Tahun 2020
- D. Analisa Capaian Keuangan Tahun Anggaran 2020

BAB IV P E N U T U P

BAB II

PERENCANAAN KINERJA.

2.1. RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023 antara lain :

- a) Meningkatkan pendidikan politik masyarakat di Kota Palangka Raya yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.
- b) Kondisi geografis di beberapa wilayah di Kota Palangka Raya, seperti daerah terpencil dan daerah pinggiran sungai, yang bisa menghambat akses Pemerintah Daerah untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan kondisi kesatuan bangsa dan politik masyarakat.
- c) Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (distrust) pada proses hukum.
- d) Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pemilu kada yang terlalu sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.

1. PERNYATAAN VISI.

- a. Bahwa tantangan masa depan yang semakin kompleks yang diwarnai dengan berbagai perubahan dinamis sebagai konsekuensi dari demokratisasi perlu senantiasa diantisipasi secara terus menerus dengan mengembangkan berbagai peluang dan inovasi politik.
- b. Visi yang dirumuskan adalah sebagai aspek strategis dalam mengarahkan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya jauh kedepan pada apa yang ingin dicapai Pemerintah.
- c. Rumusan Visi Kota Palangka Raya adalah **“Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, dan Sejahtera Untuk Semua”**

2. PERNYATAAN MISI.

Komitmen yang telah disepakati merupakan Penjabaran dari pelaksanaan Visi Kota Palangka Raya untuk mencapai tujuan dirumuskan dalam Misi dengan ditetapkannya Misi Organisasi diharapkan seluruh Pegawai Negeri Sipil dan pihak-pihak berkepentingan lainnya hendaknya dapat mengetahui dengan jelas Peran dan Program Kerja serta hasil yang ingin dicapai Organisasi.

Adapun Misi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya adalah masuk kedalam misi 2 dari RPJMD yaitu **“Mewujudkan kerukunan seluruh elemen Smart Society (Masyarakat cerdas)”**

Untuk melaksanakan Misi tersebut dibuat program kerja meliputi :

- a. Memanfaatkan iklim kondusif, sosial /Politik masyarakat secara bijaksana untuk partisipasi pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Kesatuan Bangsa, Integrasi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan.
- c. Menyelenggarakan Koordinasi.
- d. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat sekitar Kesatuan Bangsa, Integrasi Kebangsaan.
- e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional.

2.2 TUJUAN / SASARAN STRATEGIS.

Berdasarkan Visi, Misi dan Faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses Perencanaan Strategis Organisasi dari Tahun ketahun Anggaran berikutnya sejalan dengan rumusan untuk masing-masing tujuan yang ingin di capai dalam Tahun Anggaran bersangkutan.

a. Tujuan

1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Selain itu arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi pelaksanaan padan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam mewujudkan Program yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi kegiatan.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.
- c. Sebagai bahan masukkan dalam menentukan kebijakan anggaran dan penyusunan program kegiatan tingkat Kota Palangka Raya.

b. Sasaran Strategis

Ada beberapa sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2018 – 2023, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

a) Meningkatnya toleransi dikalangan masyarakat

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kualitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2018 – 2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kerukunan elemen masyarakat	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Indeks toleransi	10

2.3 Kebijakan dan Program

a. Kebijakan

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan Penguatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat
2. Tercapainya stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat

b. Program

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 yaitu :

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2020 antara lain ;

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
5. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
6. Program pendidikan politik

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2020-2023 antara lain ;

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
2. Program Ideologi Wawasan Kebangsaan
3. Program Peningkatan Kewaspadaan
4. Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi
5. Program Peningkatan Pendidikan Politik

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan adanya Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberi *reward* atau penghargaan atau sanksi. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Penetapan Kinerja Tahun 2020
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	1.	Dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota Palangka Raya	30
		2.	Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	20
		3.	Jumlah pertemuan terkait kerukunan umat beragama	46
		4.	Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan	92%
		5.	Tingkat partisipasi pemilih	70%
		6.	Indeks Toleransi	10

BAB.III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Pada tahun 2020 telah ditetapkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya melalui penetapan kinerja Tahun 2020. dalam penetapan kinerja tersebut juga ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2020 untuk mencapai kinerja dimaksud, capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2020 merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2020 berdasarkan pada pencapaian indikator kinerja yang telah di tentukan dalam penetapan kinerja Tahun 2020.

Capaian kinerja pada setiap sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Sasaran Strategis : Meningkatnya toleransi dikalangan masyarakat

3.2 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2020	Target RPJMD	Realisasi	
					2019	2020
1.	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota Palangka Raya	30	30	4	4
		Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	20	20	32	18
		Jumlah pertemuan terkait kerukunan umat beragama	46	46	6	10

		Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan	92%	92%	99%	92%
		Tingkat partisipasi pemilih	70%	70%	77,5%	62,83%
		Indeks Toleransi	10	10	43	-

3.2.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya 2020 dengan realisasi kinerja tahun 2020. Dari tabel 3.1 Realisasi Kinerja dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi pada masing-masing indikator tahun 2020 masih ada yang tidak mencapai target dan ada juga yang telah melampaui target, hal ini disebabkan oleh :

- a. Dukungan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah Kota Palangka Raya tahun 2020 belum memenuhi target, hal ini dikarenakan indikator program yang targetnya terlalu tinggi dan juga adanya pengurangan anggaran serta adanya pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak karena pandemic Covid-19, sehingga realisasinya belum bisa dicapai.
- b. Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan tahun 2020 hampir memenuhi target, hal ini dikarenakan banyaknya Ormas, LSM, Yayasan yang melaporkan kembali keberadaannya dan juga banyaknya rekomendasi pengajuan baru untuk keberadaan Ormas, LSM, Yayasan.
- c. Jumlah Pertemuan Terkait Kerukunan Umat Beragama tahun 2020 belum memenuhi target, hal ini dikarenakan target indikator yang terlalu tinggi dan adanya pembatasan pertemuan dengan mengumpulkan orang banyak, karena pandemic covid-19
- d. Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan tahun 2020 telah memenuhi target, hal ini dikarenakan proaktifnya penyampaian laporan dalam hal Rencana Aksi Daerah (RAD) Penangan Konflik Sosial di Masyarakat baik ke pemerintah daerah/provinsi maupun ke pemerintah pusat.

- e. Tingkat Partisipasi Pemilih tahun 2020 belum memenuhi, hal ini dikarenakan keterbatasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Palangka Raya melakukan Sosialisasi kepada masyarakat yang melibatkan Babinsha, Babinkantibnas, Camat, Lurah, RT/RW, dan Tokoh-Tokoh Masyarakat, di sebabkan oleh pembatasan pertemuan/mengumpulkan orang banyak, karena mengacu pada peraturan Walikota Palangka Raya mengenai pembatasan pertemuan yang di sebabkan oleh pandemi Covid-19.
- f. Indeks Toleransi Tahun 2020 telah masih belum memenuhi target, hal ini dikarenakan hasil penilaian setara institute untuk kota Palangka Raya masih belum di sampaikan.

3.2.2 Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2020 pada tabel 3.1 Realisasi Kinerja, dari semua indikator ada beberapa yang belum mencapai target yang terpenuhi dikarenakan adanya pengurangan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang di sebabkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya.

Sedangkan pada Tahun 2020, berdasarkan tabel 3.1 Realisasi Kinerja, dari 6 (enam) indikator kinerja, 1 (satu) indikator yang mencapai target dengan pencapaian 100%, sedangkan yang lainnya $\leq 100\%$

3.2.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2020 berdasarkan tabel 3.1 Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu :

- a. Dukungan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah kota Palangka Raya untuk target RPJMD yaitu 30 tetapi untuk realisasi tahun 2020 berjumlah 4 kegiatan atau 13% dari target.
- b. Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan untuk target RPJMD yaitu 20 tetapi untuk realisasi tahun 2020 berjumlah 18 surat atau 90% dari target.
- c. Jumlah Pertemuan Terkait Kerukunan Umat Beragama untuk target RPJMD yaitu 46 tetapi untuk realisasi tahun 2020 berjumlah 10 kegiatan atau 22% dari target.

- d. Persentase Capaian Kinerja Pencegahan, Pemulihan untuk target RPJMD yaitu 92% tetapi untuk realisasi tahun 2020 berjumlah 92% atau 100% dari target.
- e. Tingkat Partisipasi Pemilih untuk target RPJMD yaitu 70% tetapi untuk realisasi tahun 2020 berjumlah 62.83% atau 90% dari target
- f. Indeks Toleransi untuk target RPJMD yaitu Peringkat 10 tetapi untuk realisasi tahun 2020 masih belum diketahui hasil dari Setara Institut.

3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2020

Analisis penyebab kurangnya pencapaian target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2020 berdasarkan tabel 3.1 Realisasi Kinerja yaitu karena adanya pengurangan anggaran dan meningkatnya penyebaran virus Covid-19, sehingga semua kegiatan dan pertemuan di kurangi untuk meperan aktif dalam melakukan sosialisasi kegiatan-kegiatan yang sudah disusun, baik melalui media cetak maupun melewati website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya serta laporan yang telah disampaikan tepat waktu. Sedangkan untuk kegagalan kinerja tahun 2020 disebabkan oleh efisiensi dan kurangnya waktu pelaksanaan kegiatan.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut pada tahun selanjutnya yaitu dengan mengevaluasi kembali target pada indikator kinerja pada saat perubahan RPJMD dan Renstra menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

3.2.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jika di lihat dari pagu dana yang diberikan Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tiap tahun anggaran akan didapati kenaikan dan penurunan anggaran baik itu Belanja Tidak Langsung maupun belanja langsung untuk menopang kinerja sebagaimana tabel di bawah ini .

No	Tahun Anggaran 2020	Tahun Anggaran 2021
1	6.406.712.635,13	0

Dengan jumlah 30 orang ASN dan 9 orang PTT yang 30 % latar belakang disiplin ilmunya yang berbeda-beda, maka pengelolaan sumber daya manusia menjadi prioritas utama pimpinan dimana penempatan

personil yang mengampu tugas pokok dan fungsi yang berhubungan langsung dengan pemenuhan indikator utama harus benar-benar diperhitungkan. Namun dengan penurunan anggaran yang diberikan tidak membuat kinerja ASN Badan Kesatuan dan Politik Kota Palangka Raya menurun. Dengan demikian penambahan dan pengurangan anggaran tidak serta merta membuat kondisi menjadi buruk, namun sebaliknya ada kecenderungan peningkatan atas kinerja.

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis Pencapaian keberhasilan kinerja sasaran di atas didukung oleh pencapaian program yang mendukung pencapaian sasaran antara lain:

3.2 Tabel Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Program	Indikator program	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat	Dukungan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah Kota Palangka Raya	35	4	11%
		Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	20	18	90%
		Jumlah pertemuan terkait kerukunan umat beragama	46	10	22%
		Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan	94%	94%	100%
		Tingkat partisipasi pemilih	70%	62,83%	90%
		Indeks toleransi	10	-	0%

Program ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mempunyai sasaran meningkatnya toleransi dikalangan masyarakat pada tahun 2020 dibebani anggaran sebesar Rp. 6.406.712.635,13 dengan realisasi Rp. 6.224.050.833 (97,15%).

Program ini didukung oleh 30 kegiatan dimana masing-masing bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan kegiatan dimaksud dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Palangka Raya. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari sekretariat yang mengampu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebagai urat nadi administrasi secara umum yang menyokong sarana dan prasarana kerja pada masing-masing bidang yang mendukung terpenuhinya indikator program utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya memperoleh total anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya sebesar Rp. 6.406.712.635,13 yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 3.983.537.465.- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.776.718.927,63.- Realisasi penggunaan anggaran tersebut di tunjukan pada Tabel 3.6 dan 3.7

Tabel. 3.6
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	1.464.186.757,50	1.398.477.701	95.51
2	Program Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan	2.67.338.000	253.488.000	94.82
3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	1.516.112.950	1.515.862.950	99.98
4	Program Peningkatan Ketahanan Sosial Ekonomi	189.801.000	189.776.000	99.99
5	Program Peningkatan Pendidikan Politik	192.555.000	176.632.000	91.73
JUMLAH		3.629.993.707,50	3.534.236.651	97.36

Tabel. 3.7
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2020
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.776.718.927,63	2.689.814.182	97.00

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mendapat alokasi anggaran dari APBD Kota Palangka Raya sebesar Rp. 6.406.712.635,13 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.776.718.927,63 dan belanja langsung sebesar Rp. 3.629.993.707,50. Penyerapan anggaran tersebut adalah masing-masing Rp. 3.534.236.651 atau 97.36% untuk belanja langsung dan tidak langsung Rp. 2.689.814.182 atau 97.00% untuk belanja langsung. Dengan demikian total penyerapan anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp. 6.224.050.833 atau 97.15%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian penyerapan anggaran untuk keseluruhan kegiatan belanja langsung dan tidak langsung termasuk sangat baik.

Keseluruhan pencapaian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya secara umum telah berhasil menyelenggarakan program dan kegiatan dengan baik sesuai dengan rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2020. Selain itu, rancangan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dinilai cukup efektif dalam mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis

Hasil akuntabilitas kinerja pada Bab III menunjukkan tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya pada Tahun 2020, yang di ukur melalui pencapaian target indikator kinerja.

Dari luasan lokasi yang seyogyanya menjadi jangkauan Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sesuai Visi dan Misi yang diemban dalam Tahun Anggaran 2020 baru sebagian Sasaran Strategis yang memenuhi target Capaian Kinerja. Hal ini terjadi kendala antara lain sebagai berikut :

1. Dana untuk beberapa komponen dari properti yang diusulkan semula.
2. Masih banyak berbagai kalangan yang kurang memahami pentingnya eksistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dari sisi Pembangunan Kesatuan Bangsa, Integrasi Bangsa dan Pembangunan Pgram yang disetujui tidak sesuai seolitik.
3. Sumber Daya Manusia sebagai pendukung Pencapaian Kinerja masih perlu peningkatan kualitas dan keterampilan manajerial yang tinggi dibidangnya, disamping juga kualitas sesuai keperluan.
4. Peralatan pendukung yang tidak kurang pentingnya adalah Peralatan Administrasi dan Sarana Mobilitas untuk memungkinkan kecepatan dan ketepatan sesuai situasi yang diperlukan.

Dalam perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode tahun 2018 - 2023. Target capaian indikator keberhasilan setiap sasaran telah didesain untuk meningkat setiap tahunnya. Memperhatikan target sasaran tersebut dan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, maka perlu direncanakan dan dirumuskan kegiatan-kegiatan yang inovatif dan efektif yang mengarah kepada pencapaian target dan sasaran.

Selain itu, kegiatan antar bidang seharusnya bersinergi dan saling mendukung, sehingga pencapaian target dan sasaran akan lebih optimal. Pada aspek pelaksanaan, setiap kegiatan harus dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran dan tepat waktu sehingga tujuan dan sasaran kegiatan dapat dicapai dan penyerapan anggaran dapat ditingkatkan.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini semoga dapat menjadi tolok ukur bagi Pelaksanaan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya yang lebih baik ditahun mendatang.

Disadari bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini tidak terlepas dari Kekurangan dan kelemahan serta masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu sekali lagi diperlukan kritik membangun dari berbagai pihak yang berkepentingan.

